BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Setiap negara pasti mempunyai tujuan negaranya masing-masing, begitu pula dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 khususnya Alenia keempat yaitu "...melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial...".

Salah satu tujuan Bangsa Indonesia untuk memajukan kesejahteraan umum rakyatnya adalah dengan mengadakan Pembangunan Nasional baik fisik maupun non fisik. Pembangunan fisik yaitu berupa pembangunan berbagai macam gedung bertingkat, gedung perkantoran, pusat perbelanjaan, bendungan, jalan raya, jembatan, bandara, dermaga, dan sebagainya.¹

Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja mempunyai peranan dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku dan tujuan pembangunan. Sesuai dengan peranan dan kedudukan tenaga kerja, diperlukan pembangunan ketenagakerjaan untuk meningkatkan

¹ Ratna Aji Prastiwi, "Perjanjian Pemborongan (Studi Kasus Rehabilitasi Jalan Wonosari-Semin di Kabupaten Gunung Kidul)" Skripsi Sarjana Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2008, hal.1

kualitas tenaga kerja dan peran sertanya dalam pembangunan serta peningkatan perlindungan tenaga kerja dan keluarganya sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan.²

Tenaga kerja adalah salah satu langkah pembangunan ekonomi, yang mempunyai peranan signifikan dalam segala aktivitas nasional, khususnya perekonomian sosial dalam hal peningkatan produktivitas dan kesejahteraan. Tenaga kerja yang melimpah sebagai penggerak tata kehidupan ekonomi serta merupakan sumber daya yang jumlahnya melimpah.³

Disadari bahwa dalam pelaksanaan pembangunan nasional, tenaga kerja memiliki peran dan kedudukan yang sangat penting sebagai pelaku untuk mencapai tujuan pembangunan. Sejalan dengan itu pembangunan ketenagakerjaan diarahkan untuk meningkatkan kualitas dan kontribusinya dalam pembangunan serta untuk melindungi hak dan kepentingan sesuai dengan harkat dan martabat manusia.⁴ Untuk menjamin kesehatan dan keselamatan tenaga kerja maka perlu dibentuk perlindungan tenaga kerja, karena banyak resiko yang dapat dialami oleh pekerja dalam melakukan pekerjaannya. Apabila sewaktu ketika tenaga kerja mengalami sakit akibat

² Asri Wijayanti, *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hal. 6

³ Lalu Husni, *“Pengantar Hukum Ketenagakerjaan, Ed-Revisi,”* Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, Hal.47

⁴ Andina Yulistia Prameswari, *“Perlindungan Hukum Keselamatan Dan Kesehatan Kerja Terhadap Tenaga Kerja Di Pt. X Sidoarjo”*, Skripsi Sarjana Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran”, Surabaya, 2012, hal 2

pekerjaannya, kecelakaan kerja maupun hari tua, sudah ada penggantian sesuai atas apa yang telah dikerjakannya.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa pembangunan ketenagakerjaan bertujuan untuk menciptakan pemerataan kesempatan kerja dan penyediaan tenaga kerja yang sesuai dalam mewujudkan kesejahteraan. Sedangkan pengertian tenaga kerja dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003, tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.⁵

Para tenaga kerja dalam melaksanakan pembangunan harus didukung juga dengan jaminan hak setiap pekerja. Setiap tenaga kerja diberikan kesempatan untuk memperoleh pekerjaan yang sesuai dengan kemampuan dan keahliannya serta diberikan penghasilan yang layak sehingga dapat menjamin kesejahteraan dirinya beserta keluarga yang menjadi tanggungannya.

Dalam Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas:

- 1) Keselamatan dan kesehatan kerja
- 2) Moral dan kesusilaan; dan

⁵ Ibid., hal. 3.

- 3) Perlakuan yang sesuai dengan harkat dan martabat manusia serta nilai-nilai agama.

Perlindungan tenaga kerja timbul karena adanya perjanjian yang disepakati oleh pihak pengusaha dengan pekerja/buruh, sehingga menimbulkan apa yang disebut dengan hubungan kerja. Tenaga kerja yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan baik dalam suatu bentuk perjanjian kerja waktu tertentu terutama tenaga kerja lokal harus diberikan perlindungan hukum terkait dengan sistem kinerja tenaga kerja, pengupahan maupun jaminan sosial tenaga kerja pada suatu perusahaan.⁶

Hak atas Jaminan Sosial muncul karena memang sudah kodratnya bahwa manusia memiliki kehidupan yang tidaklah abadi. Seringkali manusia itu tertimpa ketidakberuntungan. Kehidupan manusia dapat diibaratkan seperti magnet yang memiliki dua kutub yaitu kutub utara dan selatan. Dimana hal tersebut sesuai dengan keadaan manusia yang berada dalam ketidakpastian.⁷

Adanya perlindungan tenaga kerja adalah untuk memberi perlindungan keselamatan bagi pekerja/buruh pada saat bekerja, sehingga apabila dikemudian hari terjadi kecelakaan kerja pekerja/buruh tidak perlu

⁶ Marthen Rahanra, “*Perlindungan Hukum Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Dan Pekerja Lokal Dalam Waktu Tertentu Terhadap Perjanjian Kerja Pada Proyek LNG Tangguh di Era Pandemi Covid-19*” Jurnal Hukum Magnum Opus, Vol 4 No. 1, 2021, hal. 117.

⁷ Zaeni Asyhadie, *Aspek-aspek Hukum Jaminan Sosial Tenaga Kerja*, Cet.1, PT.Rajawali, Jakarta, 2008, Hal. 2 (selanjutnya disebut Zani Asyhadie)

khawatir karena sudah ada peraturan yang mengatur keselamatan bekerja dan tata cara penggantian ganti rugi dari kecelakaan kerja tersebut. Maka setiap badan usaha harus memberikan perlindungan kerja terhadap tenaga kerjanya.

PT. Gunung Reduk merupakan suatu perusahaan konstruksi bidang Pelaksanaan dengan bentuk Perseroan Terbatas. PT. Gunung Reduk adalah kontraktor yang mengerjakan proyek nasional. PT. Gunung Reduk yang beralamat di Jl. Lebe Kader, Kampung Mongal, Kecamatan. Bebesen, Kabupaten Aceh Tengah saat ini memiliki kualifikasi M1. Kualifikasi M1 adalah kualifikasi perusahaan atau badan usaha jasa pelaksana konstruksi atau kontraktor yang mampu melaksanakan pekerjaan dengan resiko sedang, berteknologi sedang dan biaya yang sedang.

1. Resiko Sedang

Resiko yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya dan pemanfaatan bangunan-konstruksinya dapat membahayakan keselamatan umum, harta benda, jiwa manusia dan lingkungan.

2. Teknologi Sedang

Teknologi yang mencakup pekerjaan konstruksi yang pelaksanaannya menggunakan sedikit peralatan berat serta memerlukan sedikit tenaga ahli.

3. Nilai Proyek (biaya yang sedang)

Kualifikasi M1 memiliki kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan jasa pelaksana konstruksi dengan nilai proyek sampai dengan Rp. 10 Milyar.

Dalam melakukan suatu proyek konstruksi maka dilakukan perencanaan terpadu. Hal ini terkait dengan metode penentuan besarnya biaya yang diperlukan, rancang bangun, dan efek lain yang akan terjadi saat pelaksanaan konstruksi. Sebuah jadwal perencanaan yang baik, akan menentukan suksesnya sebuah bangunan yang terkait dengan pendanaan, dampak lingkungan, keamanan lingkungan, ketersediaan material, logistik, ketidaknyamanan publik terkait dengan pekerjaan konstruksi, persiapan dokumen tender, dan lain sebagainya.

PT. Gunung Reduk memiliki tanggung jawab yang besar terhadap tenaga kerja konstruksinya. Perlindungan hukum terhadap pekerja merupakan kebutuhan mendasar dan mutlak yang harus dipenuhi pihak perusahaan terhadap pekerja, salah satunya adalah kebutuhan akan pemenuhan kesejahteraan yang berbentuk Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang bertransformasi menjadi Badan Penyelenggara Jaminan Sosial. Berdasarkan hal-hal tersebut diatas maka sebenarnya PT. Gunung Reduk wajib mengikutsertakan pekerja ke dalam program BPJS Ketenagakerjaan. Menurut UU Ketenagakerjaan pada Pasal 99 ayat (1) dikatakan bahwa setiap pekerja/buruh dan keluarganya berhak untuk memperoleh jaminan sosial kerja. Kemudian, Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan

Sosial (yang selanjutnya disebut UU BPJS). Menyebutkan “Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjaannya sebagai peserta kepada badan penyelenggara jaminan sosial sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti”.

Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (yang selanjutnya disebut BPJS) merupakan badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial sebagai salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak. BPJS merupakan transformasi dari Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK) yang berdiri pada tahun 1992. BPJS sebagaimana dimaksud yaitu BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. BPJS Ketenagakerjaan suatu program jaminan sosial bagi tenaga kerja bersifat wajib yang menyelenggarakan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT), Jaminan Pensiun (JP), dan Jaminan Kematian (JKM).

Jaminan sosial dimaksudkan untuk memberikan perlindungan bagi tenaga kerja terhadap resiko sosial-ekonomi yang menimpa tenaga kerja dalam melakukan pekerjaan baik berupa kecelakaan kerja, sakit, hari tua, maupun meninggal dunia, dengan demikian diharapkan ketenangan bagi pekerja akan terwujud, sehingga produktivitasnya akan semakin meningkat. Dalam prakteknya meski program jaminan sosial telah dirancang sejak tahun 1992, ternyata masih ada pekerja/buruh yang belum terdaftar sebagai

peserta program jaminan sosial ini salah satunya pekerja/buruh yang bekerja pada PT.Gunung Reduk.

Berdasarkan Pasal 86 ayat (1) UU Ketenagakerjaan disebutkan bahwa setiap pekerja/buruh mempunyai hak untuk memperoleh perlindungan atas kesehatan dan keselamatan kerja, namun pada kenyataannya PT. Gunung Reduk tidak mendaftarkan para tenaga kerja konstruksinya ke dalam program jaminan sosial atau BPJS.

BPJS Ketenagakerjaan bukan saja wajib diberikan kepada mereka yang bekerja sebagai karyawan tetap perusahaan, namun juga termasuk mereka yang bekerja secara kontrak melalui Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT). Lebih lanjut, pekerja paruh waktu, pekerja harian lepas, dan borongan juga memperoleh kesempatan yang sama untuk dapat menikmati perlindungan ketenagakerjaan. Pembahasan mengenai jenis BPJS yang melindungi pekerja dalam waktu tertentu ini diatur dalam Keputusan Menteri Tenaga Kerja (Kepmenaker) No KEP-150/MEN/1999 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja bagi Tenaga Kerja Harian Lepas, Borongan, dan PKWT. Dalam Pasal 2 ayat (1), Kepmenaker tersebut mengatur bahwa pemilik usaha berkewajiban untuk mendaftarkan tenaga kerja yang dipekerjakannya dalam program jaminan sosial ketenagakerjaan, termasuk mereka yang terikat dalam PKWT. Kemudian, dalam Pasal 13 ayat (1), Kepmenaker tersebut juga menyatakan bahwa pekerja yang terikat dalam PKWT juga wajib didaftarkan dalam program jaminan kecelakaan kerja, jaminan kematian, jaminan hari tua, dan

jaminan pemeliharaan kesehatan ketika telah dipekerjakan selama 3 bulan atau lebih secara berturut-turut.⁸

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja menyebutkan:

Jenis program jaminan sosial meliputi:

- a. Jaminan kesehatan;
- b. Jaminan kecelakaan kerja;
- c. Jaminan hari tua;
- d. Jaminan pensiun;
- e. Jaminan kematian; dan
- f. Jaminan kehilangan pekerjaan.

Namun di dalam skripsi ini penulis hanya membahas dan meneliti mengenai Jaminan Kecelakaan Kerja saja.

Berikut tabel yang menunjukkan jumlah pekerja yang mengalami kecelakaan pada pembangunan gedung kantor kejaksaan negeri oleh PT.Gunung Reduk di kabupaten Aceh Tengah dari Agustus-Desember Tahun 2020:

Tabel I
Jumlah Kasus Kecelakaan Kerja yang Mengalami Luka Berat dan Luka Ringan pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah dari Bulan Agustus-Desember Tahun 2020 :

Bulan	Jumlah Kasus Kecelakaan	
	Luka Berat	Luka Ringan
Agustus	-	1
September	-	1
Oktober	1	1

⁸I Kadek Surya Juliarnawa, I Putu Gede Seputra, Ni Made Puspasutari Ujjanti, “Perindungan Hukum Bagi Pekerja Paruh Waktu Dalam Keselamatan Dan Kesehatan Melalui Program Jaminan Sosial Tenaga Kerja”, Jurnal Konstruksi Hukum, Vol 2 No. 2, 2021, hal 407.

November	-	2
Desember	1	-

Sumber : PT. Gunung Reduk

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa pada bulan Agustus Tahun 2020 terdapat 1 pekerja yang mengalami luka ringan, pada bulan September ada 1 pekerja yang mengalami luka ringan, pada bulan Oktober terdapat 1 pekerja yang mengalami luka berat dan 1 pekerja mengalami luka ringan, pada bulan November ada 2 pekerja mengalami luka ringan, kemudian pada bulan Desember terdapat 1 pekerja yang mengalami luka berat. Hal ini menjelaskan bahwa pekerjaan konstruksi ini mempunyai tingkat resiko yang sangat tinggi dan setiap pekerja perlu perlindungan hukum yang menjamin pemberian jaminan sosial tenaga kerja bagi mereka. Tetapi pihak PT. Gunung Reduk tidak melaksanakan tanggung jawab dengan tidak memberikan perlindungan hukum yang sesuai dengan Undang-Undang.

Maka penulis tertarik untuk meneliti dan menulis permasalahan tersebut dalam skripsi dengan judul : **“Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah).**

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, penulis membatasi pokok permasalahannya sebagai berikut :

1. Bagaimana Bentuk Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah?
2. Apakah Kendala Yang Dihadapi Oleh PT. Gunung Reduk Dalam Memberikan Tanggung Jawab Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut :

1. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Bagaimanakah Bentuk Tanggung Jawab PT. Gunung Reduk Terhadap Tenaga Kerja Yang Mengalami Kecelakaan Kerja Pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah.
2. Untuk Mengetahui Dan Menganalisis Kendala-Kendala Apakah Yang Menyebabkan PT. Gunung Reduk Kurang Bertanggung Jawab Dengan Tidak Mengikutsertakan Tenaga Konstruksinya Dalam Program BPJS,

Pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk Di Kabupaten Aceh Tengah.

D. Manfaat Penelitian

Suatu penelitian harus dapat memberikan manfaat yang tidak hanya bagi peneliti sendiri, namun juga bagi orang lain. Adapun manfaat yang diharapkan dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis, hasil penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk dapat memperluas pengetahuan dalam bidang ilmu hukum khususnya tentang tanggung jawab penyedia terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.
2. Manfaat Praktis, penelitian ini juga diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran di bidang hukum pada umumnya bagi mahasiswa Universitas Jambi, dan bagi mahasiswa Fakultas Hukum pada khususnya tentang tanggung jawab penyedia terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja.

E. Kerangka Konseptual

Untuk tidak menimbulkan salah penafsiran dalam skripsi ini, maka penulis menjelaskan maksud dari judul skripsi ini sebagai berikut :

1. Tanggung jawab

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa: “seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab

hukum, subyek berarti bahwa dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan.⁹

2. Penyedia

Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak. Penyedia yang dimaksud di dalam Skripsi ini adalah PT.Gunung Reduk.

3. Perlindungan Tenaga Kerja

Adalah perlindungan yang diberikan oleh penyedia dan subpenyedia, yaitu mengikutsertakan tenaga kerja konstruksinya pada program Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS), memberikan fasilitas Alat Pelindung Diri (APD), dan perlengkapan keselamatan kerja yang memadai.

4. PT. Gunung Reduk

Adalah suatu Perseroan Terbatas yang bergerak dalam bidang konstruksi pembangunan gedung.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis dapat menyimpulkan bahwa perlindungan tenaga kerja akibat kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri di Kabupaten Aceh Tengah adalah suatu proses atau perbuatan untuk melindungi setiap orang yang bekerja atas pengaruh yang ditimbulkan oleh terjadinya kecelakaan

⁹ Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, BEE Media Indonesia, Jakarta, 2007, hlm. 81

pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri di Kabupaten Aceh Tengah.

F. Landasan Teori

1. Teori Perlindungan Hukum

Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat dengan tujuan agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan hukum.¹⁰

2. Teori Kepastian Hukum

Menurut Sudikno Mertokusumo, kepastian hukum adalah jaminan bahwa hukum dijalankan, bahwa yang berhak menurut hukum dapat memperoleh haknya dan bahwa putusan dapat dilaksanakan.¹¹

3. Teori Kesejahteraan Sosial

Menurut W.J.S Poewodarminto (Adi, 2015) bahwa kesejahteraan merupakan kondisi dimana seseorang dalam keadaan aman, makmur sentosa, selamat dari berbagai segala macam gangguan masalah atau kesukaran dan sebagainya. Gangguan masalah ini meliputi dari berbagai aspek yaitu gangguan kesehatan, gangguan pendidikan, gangguan kerja dan sebagainya.¹²

4. Teori Keadilan

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : PT. Citra Aditya Bakti), hal 54.

¹¹ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, Liberty, Yogyakarta, 2007, hal. 106.

¹² <http://eprints.umpo.ac.id/5766/3/BAB%2011.pdf>

Franz Magnis Suseno membedakan keadilan kedalam keadilan dalam arti formal dan keadilan dalam arti materil. Menurut Magnis Suseno sebagaimana dikutip oleh Martitah, keadilan dalam arti formal (prosedural) adalah keadilan dalam arti bahwa hukum itu berlaku secara umum, sedangkan keadilan dalam arti materil (substanstif) adalah keadilan dalam arti bahwa setiap hukum harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.¹³

G. Metode Penelitian

1. Tipe / Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat yuridis empiris. Penelitian yuridis empiris dapat disebutkan dengan penelitian secara lapangan, yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta yang telah terjadi didalam kehidupan masyarakat.¹⁴

2. Spesifikasi Penelitian

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, yaitu memberikan gambaran dan menganalisis secara rinci mengenai perlindungan hukum terhadap tenaga kerja dalam hal jaminan sosial bagi tenaga kerja pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri di Kabupaten Aceh Tengah. Lokasi yang dipilih sebagai tempat penelitian adalah lokasi Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri di Kabupaten Aceh Tengah.

¹³ Martitah, *Mahkamah Konstitusi dari Negative Legislature ke Positive Legislature*, Konstitusi Press, Jakarta, Hal.189

¹⁴ Bambang Waluyo, "*Penelitian Hukum Dalam Praktek*" Sinar Grafika, Jakarta, 2002, hal.15

3. Populasi dan Sample

- a) Populasi adalah keseluruhan atau himpunan obyek dengan ciri yang sama. Populasi dapat berupa himpunan orang, benda (hidup atau mati), kejadian, kasus-kasus, waktu, atau tempat, dengan ciri dan sifat yang sama.¹⁵ Maka dalam penelitian ini populasi yang dimaksud adalah tenaga kerja PT. Gunung Reduk yang berjumlah 7 orang.¹⁶
- b) Sampel adalah sebagian dari populasi yang karakteristiknya hendak diteliti. Dalam penelitian ini, penulis menggunakan jenis sampel bertujuan (*purposive sample*). Jenis sampel bertujuan (*purposive sample*) ini dalam memilih subjek-subjek sampelnya, diambil anggota-anggota sampel sedemikian rupa sehingga sampel tersebut benar-benar mencerminkan ciri-ciri yang sudah dikenal sebelumnya.¹⁷ Penulis mengambil jumlah sampel sebanyak 7 orang, yaitu tenaga kerja yang mengalami luka berat sebanyak 2 orang dan tenaga kerja yang mengalami luka ringan sebanyak 5 orang dalam masa kerja pada pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah.

4. Pengumpulan Data

¹⁵ Sunggono, Bambang, Metodologi Penelitian Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2009, hal. 118

¹⁶ Wawancara dengan Iskandi, Manajer Pelaksana PT.Gunung Reduk. Tanggal 10 Juli 2021.

¹⁷ Soemitro, Ronny Hanitijo, Metodologi Penelitian Hukum, Ghalia Indonesia, Semarang, 1983, hal. 58

Data yang diperoleh adalah data dari berbagai sumber yang berkaitan dengan masalah yang diteliti :

- 1) Data Primer, yaitu data yang diperoleh langsung di lapangan, melalui wawancara dengan beberapa orang tenaga kerja yang mengalami kecelakaan kerja pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah.
- 2) Data sekunder, yaitu data yang diperoleh penulis dari informasi dan dari kepustakaan dengan mempelajari buku-buku, peraturan-peraturan yang ada hubungannya dengan penelitian ini yang terdiri dari :
 1. Bahan hukum primer yaitu bahan yang diperoleh dengan mempelajari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah ketenagakerjaan dan jaminan sosial tenaga kerja.
 - a) KUHPerdata (Burgelijk Wetboek)
 - b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
 - c) Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 Tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (UU BPJS)
 - d) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 Tentang Jaminan Sosial Tenaga Kerja (jamsostek)
 - e) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja

5. Pengolahan dan analisis data

Pengolahan dan analisis data pada penelitian ini menggunakan penyajian dalam bentuk tabel, analisis yang digunakan yaitu analisis kualitatif.

H. Sistematika Penulisan

Secara sistematis dalam penulisan proposal skripsi ini dibagi kedalam empat bab, dimana masing-masing bab yang berisi hal-hal yang dijelaskan sebagai berikut ini :

BAB I . Pendahuluan, pada bab ini dikemukakan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka konseptual, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II. Landasan Teori, Tinjauan Umum, pada bab ini berisikan tentang konsep teoritis, dan peraturan perundang-undangan yang dijadikan dasar bagi analisis pokok permasalahan dalam bab III yaitu meliputi : pengertian tenaga kerja, pekerja, penyedia, pengertian hubungan kerja, perlindungan hukum pekerja, kecelakaan kerja, ruang lingkup BPJS, Kepesertaan BPJS, hak dan kewajiban penyedia dan pekerja.

BAB III. Tanggung Jawab Penyedia Terhadap Perlindungan Tenaga Kerja (Studi Kasus Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah), Pada bab ini berisi tentang uraian dan analisis data hasil penelitian secara sistematis, tentang bagaimana bentuk tanggung jawab penyedia terhadap perlindungan tenaga kerja yang mengalami kecelakaan pada Pembangunan Gedung Kantor Kejaksaan Negeri Oleh PT. Gunung Reduk di Kabupaten Aceh Tengah.

Dan faktor-faktor apa saja yang menyebabkan PT. Gunung Reduk kurang bertanggung jawab dengan tidak mengikutsertakan tenaga kerja nya ke dalam program BPJS.

BAB IV. Penutup, pada bab ini berisi tentang kesimpulan serta saran, kesimpulan memuat pernyataan singkat berkaitan dengan hasil pembahasan untuk menjawab permasalahan penelitian. Sedangkan saran memuat sumbangan pemikiran dari penulis terhadap permasalahan yang menjadi objek dalam penulisan ini.